

LAPORAN PUBLIK 2018





LAPORAN PUBLIK 2018

DAFTAR ISI

- iv Kata Pengantar
- vi Lintasan INFID 2018
- viii INFID dalam Angka
- x Testimoni
- xiii Dewan Pengawas
- xiii Dewan Pengurus
- xiii Sekretariat

1 BAB 1. PROFIL

- 1 A. Sejarah INFID
- 3 B. Analisa Konteks Program

6 BAB 2. PROGRAM INFID 2018

- 7 A. Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 8 B. Penurunan Ketimpangan
- 9 C. Program HAM dan Demokrasi
- 11 D. Program Preventing Violent Extremism

28 BAB 3. INFID DALAM MEDIA

- 12 A. Media Massa
- 13 B. Media Sosial

14 BAB 4. ANALISIS DAMPAK PROGRAM

- 15 A. Jumlah Beneficiaries
- 17 B. Inovasi Program

33 LAMPIRAN

- 20 Lampiran I
- 24 Lampiran II
- 28 Lampiran III

KATA PENGANTAR

Direktur Eksekutif INFID



Pada 2018 ini, INFID menjalani kiprahnya yang ke-33 tahun di Indonesia. Dengan usia kelembagaan yang makin matang, patut disyukuri, peran serta jangkauan program yang dilaksanakan INFID senantiasa konsisten. INFID terus memfokuskan kerjanya di sektor pembangunan serta demokrasi di Indonesia.

Kemampuan para pengurus INFID untuk bisa melaksanakan seluruh rencana kerjanya tidak lepas dari rahmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Hasil kerja keras yang dilakukan rekan-rekan di INFID ini tersaji dalam Laporan Publik yang saat ini sudah berada di tangan sidang pembaca.

Laporan Publik 2018 ini merupakan tradisi penting yang harus dilaksanakan. Dari sisi esensinya, Laporan Publik yang tersaji ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami selaku pelaksana mandat agar selalu taat pada prosedur serta tata kelola organisasi yang profesional. Melalui Laporan Publik ini pula, sidang pembaca bisa menelaah peran yang telah dijalankan INFID melalui serangkaian program-programnya.

Sepanjang 2018 ini INFID berfokus pada tiga ranah program yakni Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Penurunan Ketimpangan, serta HAM dan Demokrasi Di bawah HAM dan Demokrasi sendiri terdapat tiga subprogram, yaitu *Preventing Violent Extremism* yang merupakan program baru yang dilaksanakan INFID sebagai bentuk respon atas meningkatnya pemikiran serta gerakan ekstremisme yang melanda sejumlah negara termasuk Indonesia; Kota Ramah HAM (Human Rights City) serta Bisnis dan HAM.

Melalui pengantar singkat ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf di Sekretariat INFID yang berkat kerja kerasnya bisa menjalankan semua program dan rencana kerja. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh anggota dan Dewan Pengurus INFID yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh kepada kami di Sekretariat, sehingga semua program bisa terlaksana dengan baik. Selain itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Farida Indriastuti, penulis yang memungkinkan diproduksi laporan tahunan ini.

INFID menyadari, selama kurun 2018 lalu masih ada sejumlah kekurangan dalam hal pelaksanaan program. Namun, kami yakin bahwa apa yang telah kami lakukan tersebut turut memberi kontribusi bagi proses pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, penegakan HAM dan demokrasi, serta tujuan umum pembangunan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Untuk itulah, INFID membuka ruang masukan dari Anda semua untuk perbaikan kinerja INFID ke depan.

Selamat membaca.

Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif

LINTASAN INFID 2018





INFID DALAM ANGKA



2004

INFID menerima Special Status Ecosoc



2017

INFID menerima Penghargaan dari Kemendagri sebagai Ormas bidang Sosial Kemanusiaan



41 %

peningkatan liputan media dari tahun 2017 ke 2018



243 liputan

tahun 2017



584 liputan

media 2018



7.214

followers di
Facebook



3.354

followers di
Twitter



1.503

followers di
Instagram



18.014

jumlah pengunjung website (visitors)



Jumlah publikasi tiap program.

Ketimpangan: 10,
Sustainable Development Goals (SDGs): 4
HAM dan Demokrasi: 7



48 kegiatan

Selama tahun 2018



20 kegiatan

Program HAM dan Demokrasi



14 kegiatan

Program Ketimpangan



45 kegiatan

Program SDGs



2.499

Penerima manfaat semua kegiatan



3.000 peserta

Festival HAM 2018 di Wonosobo



Jumlah dana dikelola:

17 M



Penelitian:

2,9 M



Advokasi kebijakan:

1,8 M



Personnel cost:

3,6 M



Overhead cost:

1,3 M



Daftar pemberi dana 2018:

Yayasan TIFA, Oxfam in Indonesia, Uni Eropa, National Endowment for Democracy (NED), Ford Foundation, Development and Peace, MAMPU (Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)



21 Staff



6 kali Jumlah kegiatan *capacity building*

TESTIMONI

ANGGOTA, JARINGAN, MITRA



Fahmi Hidayat | Desk Wonosobo Ramah HAM/SDGs Center Wonosobo

Pada 2018, Kabupaten Wonosobo terlibat dalam kolaborasi isu melalui beberapa program INFID. Dalam isu human rights city, INFID bersama Komnas HAM ikut memberi ruang bagi kabupaten ini untuk mengembangkan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Ini adalah improvisasi kelembagaan pertama di Indonesia. Di mana, ada lembaga di tingkat kabupaten berbentuk komisi yang melakukan fungsi edukasi, promosi, mediasi dan advokasi HAM. INFID juga aktif dalam melakukan engagement isu SDGs sebagai bagian dari isu HAM dan HAM adalah bagian dari SDGs. INFID memopulerkan konsep “rights-based approach” dan “rights to the city” dalam gerakan HAM serta semangat “leave no one behind” dalam gerakan SDGs sebagai tiga hal yang saling terkait satu sama lain.



Dete Aliah | Direktur Eksekutif Society against Radicalism and Violent Extremism (SeRVE) Indonesia

Saya pernah bekerja di INFID pada tahun 1996 hingga 2003 dan dari sejak dulu, INFID selalu konsisten mendorong demokrasi dan memastikan bahwa Indonesia tidak dirugikan dengan pinjaman internasional baik bilateral dan multilateral yang dilakukan pada jaman orde baru. Sekalipun INFID pada masa awal didirikan di Belanda, namun pendiri-pendiri INFID adalah orang-orang yang mempunyai komitmen membangun bangsa dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Kini, INFID tetap membawa semangatnya untuk memajukan bangsa, keamanan negeri ini juga memastikan bahwa anak muda kita tidak bergeser ke kelompok radikal. Selain isu global yang menjadi kekuatan INFID, radikalisme dan kekerasan ekstrim juga menjadi salah satu focus isu yang kini digeluti INFID. Beberapa penelitian terkait isu radikalisme dan ekstrimisme dilakukan INFID untuk melihat akar masalah yang menyebabkan radikalisme dan kekerasan ekstrim ini tumbuh menjamur baik di masjid-masjid dan perguruan tinggi negeri di Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk memetakan akar masalah dan bagaimana solusinya.



Y.W. Junardy | President of Indonesia Global Compact Network

INFID merupakan mitra strategis IGCN, terlebih dalam mengarusutamakan konsep Bisnis dan HAM serta mengedepankan sektor bisnis yang bertanggung jawab dan inklusif. Kemitraan strategis ini masih terwujud pada 2018. INFID dan IGCN memiliki program kolaborasi bersama dengan Oxfam di Indonesia dengan dukungan dana dari Uni Eropa. INFID juga menjalankan program kolaborasi secara profesional,

ditambah dengan sepaik terjang INFID yang tinggi pada isu pemenuhan HAM turut meningkatkan efektivitas proram. IGCN berharap kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat ditingkatkan di masa mendatang.



Sonya Hellen Sinombor | Jurnalis Harian Kompas

Saya sering menulis isu penurunan ketimpangan, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), serta Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi yang dikerjakan INFID. Tulisan-tulisan itu tersaji di di Harian Kompas maupun Kompas.id. Beberapa seminar atau konferensi nasional yang digelar INFID, sangat memberi manfaat. Saya bahkan sangat tertarik dengan beberapa kegiatan pertemuan yang dilakukan INFID yang menghadirkan sejumlah tokoh daerah, baik aktivis NGO maupun pemimpin daerah yang menjadi agen perubahan, serta aktif melakukan berbagai upaya untuk mengurangi bahkan menghapus ketimpangan di tengah masyarakat, termasuk ketimpangan gender yang terjadi di tengah masyarakat. Beberapa topik pertemuan yang membahas secara khusus isu perempuan semisal pencegahan ekstremisme, kejahatan seksual, pencegahan perkawinan anak, sunat perempuan, perempuan disabilitas, perempuan kepala keluarga (pekka), dan kelompok minoritas sangat membantu saya sebagai jurnalis dalam memaparkan sejumlah tulisan di media.



Ahmad Taufan Damanik | Ketua KOMNAS HAM

Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk seluruh umat manusia khususnya di Indonesia merupakan hal yang tidak mudah. Berbagai masalah hak asasi manusia di masa lalu hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diupayakan penyelesaian oleh negara. Selain itu perlu disusun skema antisipasinya agar masalah pelanggaran HAM tidak terjadi secara berulang. Sebagai sebuah lembaga negara, KOMNAS HAM memerlukan mitra kerja sama untuk terus mengingatkan negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas pemajuan, penghormatan, perlindungan pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu mitra strategis yang selama ini bekerja bersama KOMNAS HAM adalah INFID. Kerjasama yang dibangun antara KOMNAS HAM dan INFID melalui Program Human Right Cities (HRC) atau Kabupaten/Kota HAM telah sangat membantu meningkatkan pemahaman pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten dan Kota akan tanggung jawab yang diembannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Saya sangat berharap INFID dan KOMNAS HAM dapat terus bekerja sama dalam menyebarluaskan pemahaman tentang HAM dan demokrasi dan mendorong komitmen pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan yang menjunjung HAM. Lebih lanjut saya berharap INFID dapat terus melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan melalui berbagai program kreatifnya dalam mendorong implementasi hak asasi manusia di Indonesia.



Fransisca Indarsiani | Konsultan Pembangunan

Eksistensi INFID dalam pembangunan di Indonesia sangat dibutuhkan dalam memberikan perspektif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kekuatan INFID terletak pada kemampuannya membawa berbagai tokoh pembangunan, baik pemerintah, akademisi maupun organisasi masyarakat sipil dalam berbagai forum dialog kebijakan pembangunan. Komitmen dan integritas tokoh-tokoh penggerak INFID sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Selamat atas kerja-kerja produktif selama lebih dari 33 tahun, termasuk kerja-kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Semoga ke depannya semakin mampu mendukung Indonesia dalam mengatasi berbagai persoalan ketimpangan yang ada, menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.



Ririn Dewi Wulandari | Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat

INFID konsisten dalam pendampingan terkait peningkatan kapasitas CSO dalam memahami, terlibat dan mengawal pelaksanaan SDGs di kabupaten/kota. Penguatan kapasitas yang dilakukan INFID kepada CSO yang menghadirkan pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun pelaksana lapangan, sehingga banyak pengalaman dan best practice yang bisa diserap dan diimplementasikan di kabupaten/kota. Setiap momentum yang INFID adakan terkait SDGs menjadi prioritas untuk dihadiri, karena selalu ada yang baru yang bisa didapatkan.

Peningkatan kapasitas yang dilakukan INFID kepada CSO menjadikan posisi CSO di daerah kedudukannya setara ketika bermitra dengan pemerintah maupun pihak yang lainnya. Hal ini penting untuk CSO bisa melakukan perannya secara maksimal.

DEWAN PENGAWAS

Khairani Arifin

Puspa Dewi

Istiyatun

DEWAN PENGURUS

Dian Kartika Sari - Ketua

Totok Yuliyanto - Wakil Ketua

Nawawi Bahrudin - Sekretaris

Teddy Alfonso - Treasurer

Sarah Lerry Mboeik - Anggota

Suryati Simanjuntak - Anggota

Odi Shalahuddin - Anggota

STAFF INFID

Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif)

Robert Pramudarto (Direktur Keuangan)

Mugiyanto (Senior Program Officer on Human Rights and Democracy)

Lola Loveita (Program Officer Human Rights & Democracy (Preventing Violent-Extremism))

Hamong Santono (Senior Program Officer on SDGs - INFID)

Misnawati (Finance Manager)

Ima Desiyanthi (Accounting Officer)

Nidia Viska (Finance Officer)

Aulia Rachmah Putri (Program Assistant on Human Rights and Democracy)

Bona Tua P.P (Bona) (Major Event Officer)

Megawati (Program Assistant on In-Equality)

Nindhitya Nurmalitasari (Communications and Digital Officer)

Florence (HRD Manager)

Jeckson Robinson (Asisten Program)

Suwarno (IT & Procurement Officer)

Sabarno (Operational Officer)

Wasiton (Assistant Operational Officer)

Siti Khoirun Nimah (Program Manager)

Yolandri Simanjuntak (Program Associate for Human Rights & Democracy, PO SDGs)

Nadia Yunita (Staf Panitia Festival HAM 2018)

Muhammad Syafri Al Hayat (AL) (Staf Panitia Festival HAM 2018)

BAB 1 | PROFIL





A. Sejarah INFID

Kelahiran INFID bermula dari terbentuknya *Inter-NGO Conference on IGGI Matters* atau INGI pada 1985. Inisiator INGI adalah para tokoh penting asal Indonesia. Mereka adalah Abdurrahman Wahid, Asmara Nababan, Gaffar Rahman, Adnan Buyung Nasution, Dawam Rahardjo, Fauzi Abdullah, Wukirsari, Kartjono, Zoemrotin K.S., serta sejumlah tokoh lainnya. Bersama mitra dari Belanda, INGI dikukuhkan dan mulai berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia.

Setahun kemudian atau pada 1986, nama INGI berubah menjadi *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID). Meski berubah nama, INFID tetap konsisten bekerja untuk isu-isu pembangunan serta demokratisasi di Indonesia. Berkat kerja-kerjanya, pada 2004 INFID mendapatkan status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada 2007 terjadi perubahan skema kerjasama multilateral yang selama ini diterapkan Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan *Consultative Group for Indonesia* (CGI). INFID tetap berdiri dan bertransformasi menjadi organisasi berbentuk perkumpulan. INFID juga tetap konsisten mengawal serta memberikan masukan terhadap isu pembangunan serta demokratisasi di Indonesia.

Saat ini, INFID berfokus pada tiga area kerja yaitu Penurunan Ketimpangan, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, serta Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi. Penurunan Ketimpangan menjadi salah satu isu penting di tengah laju pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat ketimpangan tinggi. Ketimpangan yang terjadi di berbagai aspek pembangunan dipastikan memiliki dampak sosial, ekonomi, dan politik.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (sebelumnya MDGs) juga menjadi salah satu kajian INFID sejak digulirkan oleh PBB pada tahun 2000 lalu. Sementara itu, Program HAM dan Demokrasi INFID bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi, prinsip-prinsip HAM. Fokus kerja program ini yaitu: (i) mendorong implementasi kabupaten/kota HAM, (ii) implementasi bisnis dan HAM, (iii) pencegahan intoleransi dan ekstremisme, dan iv) menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil sekaligus melakukan konsolidasi masyarakat sipil dalam merespon perkembangan politik elektoral. INFID telah aktif melakukan kajian dan penelitian, kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, kampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di berbagai kota di Indonesia, dan advokasi kebijakan.

Pada 2018, INFID memasuki usianya yang ke-33. Saat ini, kontribusi INFID untuk isu pembangunan dan demokratisasi digerakkan oleh 20 orang staf berikut 69 anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Advokasi kebijakan yang digalang INFID juga melibatkan 13 mitra global mulai dari Forus International, Together2030, Action for Sustainable Development (Action4SD), Open SDG Club, Open Government Partnership, Civil20-G20, Asia Development Alliance (ADA), Asia Democracy Network (ADN), CIVICUS, ASEAN People' Forum (APF), TAP Network (Transparency Accountability and Participation) dan Forus International. Guna memperkuat peran dan posisinya, INFID juga berkoalisi dengan sejumlah organisasi lain sesuai fokus kerjanya.

Bidang Kerja	Mitra Koalisi
HAM dan Demokrasi	Koalisi untuk Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Toleransi, Pemajuan HAM dan Pembangunan Berkeadilan, Asia Local Democracy and Human Rights Cities Network (Asia LDC-Net)
Penurunan Ketimpangan	Koalisi Kerja Layak Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy/ICFP (Koalisi Anggaran, G20, Pajak Berkeadilan)
SDGs	Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs The Open Government Partnership

B. Analisis Konteks Program

HAM dan Demokrasi. 2018 menjadi tahun penting seiring dilaksanakannya Pemilu Kepala Daerah serentak. Ada yang menyebut, 2018 merupakan tahun politik. Penyebutan yang lebih tepat adalah tahun pemilihan atau *the election year*. Pilkada serentak di Indonesia merupakan tantangan baru bagi pemerintah maupun elemen masyarakat sipil yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Kesenjangan Pilkada 2018 juga menjadi tantangan nyata terhadap stabilitas politik nasional. Mengingat ada 17 provinsi yang memilih pasangan gubernur serta wakil gubernur, 115 kabupaten yang memilih bupati dan wakil bupati, serta ada 39 kota yang memilih walikota dan wakil walikota. Secara total ada 171 daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Kajian serta penguatan kapasitas di bidang HAM serta demokrasi menemukan urgensinya pada 2018.

Pelaksanaan Pilkada serentak pada 2018 dilaksanakan pada tahun ke-4 pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak ini pada akhirnya akan berkontribusi nyata terhadap reputasi Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi besar di dunia. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu turut berkontribusi terhadap pilihan program yang dijalankan INFID pada 2018. Harus diakui Pligub DKI Jakarta yang sempat diwarnai praktik politik identitas turut menciderai demokrasi dan hak asasi manusia, serta agenda Pemilu dan Pilpres 2019.

Isu Sustainable Development Goals. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan masih menjadi fokus kerja di Indonesia. Pada 2018, implementasi SDGs memasuki tahun ke-3. Ini berarti, masih tersisa waktu 12 tahun untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang akan dituntaskan pada 2030 mendatang. Indonesia menjadi satu dari 193 yang telah menandatangani kesepakatan TPB. Namun kemajuan pencapaian TPB ternyata masih belum secepat seperti yang diharapkan. Implementasi TPB menghadapi sejumlah kendala teknis. Bayu Krisnamurthi dalam Kompas (31/7/2019) menyebut setidaknya ada sepuluh permasalahan yang menyulitkan pelaksanaan TPB di Indonesia mulai dari (1) polusi tanah dan air, (2) deforestasi, (3) ketimpangan dan kemiskinan, (4) gizi buruk, (5) kekumuhan perkotaan, (6) ketimpangan akses pada teknologi, (7) ketidakpastian iklim, (8) iklim yang kian ekstrem, (9) konflik sosial, dan (10) bencana alam. Sebagian permasalahan belum terselesaikan karena kurangnya komitmen politik.

Isu Ketimpangan. Ketimpangan masih menjadi tantangan bagi semua negara di dunia. Dampak ketimpangan pada masyarakat dunia melanggengkan kemiskinan serta marginalisasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik. Hingga 2018, persepsi masyarakat Indonesia terhadap ketimpangan sosial yang dialaminya makin meningkat. Persepsi tersebut dibuktikan INFID melalui survei. Hasilnya, pada 2018 lalu Indeks Ketimpangan Sosial Indonesia pada 2018 berada pada skor 6. Angka ini meningkat sebesar 0,4 dibandingkan survei serupa yang dilakukan pada 2017.

Warga mempersepsi ada enam ranah yang menjadi sumber ketimpangan. Ketimpangan yang paling tinggi yakni sebesar 72,6 persen berasal dari persoalan penghasilan. Sebanyak 67,1 persen warga menilai ketimpangan berasal dari kesempatan mendapatkan pekerjaan. Berikutnya, 63,4 persen masyarakat menilai sumber ketimpangan berasal dari harta benda yang dimiliki warga. Adapun 61,8 persen masyarakat menilai sumber ketimpangan berasal dari kepemilikan tempat tinggal.

Dari sisi gender, ketimpangan antara perempuan dan laki-laki juga dirasakan. Dampak pembangunan yang dirasakan perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Tanpa perubahan struktural kuat, perempuan akan senantiasa menjadi warga



negara kelas dua. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia 2017 mencapai 90,96. Meski angkanya mendekati 100 yang menandakan mengecilnya kesenjangan laki-laki dan perempuan, IPG yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) itu dianggap tidak menggambarkan kondisi riil perempuan. IPM perempuan Indonesia lebih rendah daripada laki-laki. Walau harapan lama sekolah perempuan sedikit lebih tinggi, rerata lama sekolah perempuan 10 persen lebih rendah daripada laki-laki. Pengeluaran per kapita perempuan pun hanya 60 persen dari pengeluaran laki-laki (Kompas, 26/7/2019).

BAB 2 | PROGRAM INFID 2018





A. Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada 2018, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals memasuki tahun pelaksanaan ke-3. Pemerintah Indonesia mengakui, capaian TPB tiap negara berbeda-beda. Untuk Indonesia, capaian TPB yang terlihat nyata adalah menurunnya angka kelaparan sebagaimana ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Desember 2018. Capaian positif Sustainable Development Goals Indonesia terlihat pada meningkatnya pendidikan berkualitas. Tingkat pendidikan yang membaik di Indonesia tidak lepas dari peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang angkanya mencapai Rp 444,1 triliun pada 2018. Dalam acara SDGs Annual Conference 2018 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12/2018), Jusuf Kalla menegaskan, anggaran pendidikan yang tinggi dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan bantuan sekolah bagi anak dari golongan masyarakat yang tidak mampu.

Capaian positif SDGs Indonesia menuntut keterlibatan serta kontribusi nyata dari seluruh pihak terkait mulai dari eksekutif dan legislatif di level lokal serta elemen masyarakat yang memiliki bidang kerja SDGs. Peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada Juni 2018 merupakan upaya pemerintah Indonesia membangun kesadaran seluruh elemen bangsa untuk bisa mencapai TPB.

Peran dan Posisi INFID

Sepanjang 2018, INFID melaksanakan 17 kegiatan yang berfokus pada kajian dan workshop yang bersifat aplikatif seputar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pada 2018 ini, kerja INFID untuk isu SDGs ditekankan pada pembentukan Tim Koordinasi Multipihak serta dokumen Rencana Aksi. Rencana Aksi merupakan bagian dari kerangka regulasi, dan Tim Koordinasi Multipihak merupakan bagian kerangka kelembagaan pelaksanaan SDGs. RAD dan Tim Koordinasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs, untuk memastikan agar pelaksanaan SDGs diadopsi oleh pemerintah daerah dan dilakukan secara inklusif tanpa tidak ada satupun kelompok yang tertinggal (Leaving No One Behind).

Dalam isu TPB, INFID berkontribusi penting dalam perumusan Rencana Aksi Nasional yang diluncurkan pada Juni 2018. Di awal 2018, INFID mulai menggelar diskusi terfokus tentang *Mempersiapkan Tim Koordinasi Nasional SDGs yang Efektif dan Partisipatif*. Pasca diskusi awal, INFID menyelenggarakan Peer Review Penulisan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs pada Februari 2018. Kerja INFID untuk membangun kesepahaman bersama seputar SDGs tidak hanya difokuskan di level nasional. Di tingkat kabupaten, INFID juga memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagaimana yang dilaksanakan di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan pada April 2018. Selain itu INFID juga menyelenggarakan Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil Untuk SDGs / Seminar Nasional SDGs pada 20 September 2018 di Jakarta, yang dihadiri Menteri PPN/Bappenas serta pemangku kepentingan SDGs baik pusat maupun daerah

B. Program Penurunan Ketimpangan

Ketimpangan menjadi isu yang selalu berkaitan erat dengan gencarnya pembangunan. Salah satu wujud ketimpangan yang terlihat nyata adalah akses ekonomi. Pembangunan yang diwujudkan pemerintah melalui serangkaian program tidak lantas berbanding lurus dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya mutu pendidikan. Dalam konteks SDGs penurunan ketimpangan di tengah masyarakat menjadi isu yang berelasi. SDGs mendorong seluruh negara agar mampu menjalankan tujuan pembangunan secara demokratis, inklusif, dengan capaian kinerja yang bisa diukur secara kuantitatif. Dilihat dari perspektif ekonomi, penurunan ketimpangan merupakan target yang harus bisa dilaksanakan agar 'kue ekonomi' bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Rasio Gini, bisa menyentuh level di bawah 0,39 pada akhir 2018. Namun, Bappenas mengakui penurunan Rasio Gini bukanlah merupakan upaya yang mudah. Keberhasilan pemerintah menurunkan Rasio Gini dari sebelumnya di atas 0,4 menjadi sekira 0,39 dinilai sebagai hal yang tergolong bagus.

Pengurangan ketimpangan menjadi fokus pembangunan yang membutuhkan pendekatan secara komprehensif. Pemerintah Indonesia berfokus untuk mengurangi ketimpangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Hal ini telah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Peran dan Posisi INFID

Upaya serius INFID memotret isu penurunan ketimpangan di Indonesia direpresentasikan dalam survei. Pada Februari 2018, INFID memaparkan hasil surveinya yang bertajuk *Survey Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga*. Survei yang dilaksanakan pada 2017 ini memperlihatkan bahwa penghasilan yang diperoleh warga berperan paling besar terhadap munculnya ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Melalui survei yang melibatkan 2.250 responden tersebut, INFID juga memotret realitas ketimpangan yang merata di wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Indonesia bagian timur ketimpangan lebih tinggi dari wilayah lainnya. Selain itu, diskriminasi juga dipersepsi oleh warga baik yang tinggal di Indonesia bagian barat, tengah maupun timur. Persepsi pengalaman diskriminasi lebih tinggi di Indonesia bagian timur dan Sumatra, bila dibandingkan dengan rerata di seluruh Indonesia. Warga juga menilai masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

INFID juga melihat isu penurunan ketimpangan ini dari sudut pandang pemanfaatan teknologi digital yang kini menggerakkan sebagian kecil ekonomi Indonesia. Revolusi industri 4.0 yang terlihat nyata di Indonesia sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia seiring dikembangkannya infrastruktur digital. Muncul pertanyaan, sejauh mana kesiapan masyarakat Indonesia serta pekerjaannya. Fenomena inilah yang direspon INFID dengan menggelar empat kali diskusi khusus bertemakan tantangan revolusi industri 4.0 dan digitalisasi ekonomi. Serial diskusi tersebut diselenggarakan pada Maret, Mei, November serta Desember 2018. Di luar aspek teknologi digital yang marak digunakan warga, INFID juga menyoroti keberadaan tenaga kerja Indonesia serta kesempatan kerja yang berorientasi pada penurunan ketimpangan.

C. Program HAM dan Demokrasi

Penegakan HAM di tahun ke-4 pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum juga menunjukkan kemajuan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, selama empat tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, agenda penegakan hak asasi manusia (HAM) mengalami kemunduran (kompas.com 18/10/2018). Lebih lanjut Usman menyatakan, Pemerintahan Jokowi-JK lebih mementingkan kepentingan ekonomi dan cenderung mengesampingkan agenda penegakan HAM di Indonesia.

Kemunduran penegakan HAM di Indonesia juga dipotret majalah *The Economist*. Majalah ternama di Inggris itu menyimpulkan, indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. Salah satu indikator utamanya adalah proses elektoral dan tingkat pluralisme yang dinilai buruk. Kasus lain yang menjadi rujukan adalah serangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik itu kelompok minoritas agama dan minoritas orientasi seksual.

Catatan lain dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebutkan, kasus pelanggaran HAM di sektor SDA menjadi yang tertinggi dengan jumlah kasus atau sebanyak 194 kasus. Selain itu, jenis kasus dengan jumlah tertinggi kedua adalah pembunuhan di luar proses hukum atau *extrajudicial killing*, yang berjumlah 182 kasus (kompas.com 10/12/2018).

Dengan segala kondisi tersebut, indeks HAM Indonesia pada 2018 hanya berada di angka 0,42. Penilaian ini disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemantauan Rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR). Skor 0,42 diperoleh berdasarkan gabungan beberapa rekomendasi UPR yang dikelompokkan dalam beberapa kluster, menjadi variabel yang diturunkan dalam beberapa indikator penilaian seperti regulasi, indikator proses pelaksanaan, dan indikator dampak pelaksanaan regulasi. Koalisi memberi skor tertinggi 4 untuk setiap indikator jika tindak lanjut rekomendasi UPR sesuai dengan standar HAM. Sementara, untuk tindak lanjut yang justru bertentangan dengan rekomendasi diberi skor -1. Skor 0.42 menandakan tidak adanya kemauan politik dan kurangnya kapasitas penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban HAM internasional yang diturunkan dalam program aksi di tingkat nasional (hrwg.org 18/1/2019).

Peran dan Posisi INFID

Di tengah indikator penegakan HAM yang kurang menggembirakan pada 2018, INFID secara konsisten melaksanakan advokasi penegakan HAM yang berpijak pada prinsip keadilan serta inklusif. Kerja serius INFID untuk mengadvokasi penegakan HAM di Indonesia diwujudkan melalui promosi kepada sejumlah kabupaten atau kota untuk mengadopsi kerangka kerja Human Right Cities. Promosi ini dilakukan melalui program diskusi serta lokalatih bertajuk *Human Rights Cities bagi Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil* yang dihelat pada Mei 2018.

Program lain guna membangun kesadaran tentang pentingnya penegakan HAM dan mempromosikan Human Rights Cities juga ditempuh INFID lewat penyelenggaraan Festival HAM Indonesia 2018 (FHI 2018). Program ini diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah pada 13 sampai dengan 15 November 2018. FHI 2018 mengusung tema *Merawat Keragaman, Meningkatkan Solidaritas: Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan*. Festival HAM Indonesia 2018 pada dasarnya merupakan ajang bagi pemerintah daerah dan para pihak untuk menyebarluaskan serta berbagi pengalaman tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, Festival HAM juga merupakan ajang untuk menyebarluaskan gagasan Kabupaten/Kota HAM yang secara global sudah diterapkan di berbagai negara.

Pada 2018, INFID juga menerbitkan edisi ketiga Buku Panduan Kabupaten/Kota HAM. Sedikit berbeda dengan buku edisi sebelumnya, pada edisi ketiga tersebut

INFID menambahkan konten tentang integrasi aspek-aspek penguatan toleransi, pencegahan radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Dari sisi teknis pelaksanaan program, pendampingan pengadopsian kerangka human rights cities juga dilakukan di Kabupaten Wonosobo, Jember, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Karo dan tujuh kabupaten lain di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Untuk program Bisnis dan HAM, pada 2018 INFID meluncurkan kertas kebijakan tentang pentingnya penyusunan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM (RAN Bisnis dan HAM) oleh pemerintah RI.

D. Program *Preventing Violent Extremism*

Bagi Indonesia yang berpenduduk multikultur serta multikeyakinan, radikalisme menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi. Tumbuhnya radikalisme dipastikan akan mengancam keragaman, perdamaian serta demokrasi. Sekadar gambaran, kelompok radikal cenderung berperilaku tidak toleran terhadap orang lain yang berbeda pandangan dan perspektif. Di tingkat yang lebih tinggi, mereka juga sangat mungkin bergabung dengan kelompok ekstremis. Di banyak negara, radikalisme menjadi masalah serius karena telah memengaruhi anak-anak, remaja, orang dewasa, dan bahkan pejabat pemerintah.

Munculnya sikap radikal di sebagian kecil muslim Indonesia berkaitan dengan akar radikalisme Islam yang telah hadir di Indonesia sejak tahun-tahun awal kemerdekaan. Negara Islam Indonesia (NII) merupakan indikasi yang sangat kuat ke arah itu. Teroris kelompok-kelompok seperti Jamaah Islamiyah (JI) ke Jamaah Ansharu Daulah (JAD) adalah evolusi perjuangan DI/NII untuk menegakkan negara Islam melalui cara-cara kekerasan. Dalam dinamikanya, tren pelaku terorisme tidak lagi didominasi oleh pria dewasa, tetapi juga oleh perempuan dan bahkan anak-anak. Gencarnya penyebaran pesan radikalisme ini direspon pemerintah dengan mengembangkan ideologi nasionalisme untuk mengurangi paham radikalisme, di tengah munculnya perekrutan anggota teroris melalui media sosial.

Peran dan Posisi INFID

Sebagai lembaga yang memfokuskan program kerjanya pada isu HAM dan Demokratisasi, INFID berada pada posisi menolak radikalisme yang berujung pada ekstremisme dan terorisme. Berangkat dari posisi inilah INFID berperan sebagai salah satu lembaga yang memfasilitasi kajian seputar deradikalisasi, strategi pencegahan gerakan ekstremisme, revisi Undang-undang Tindak Pidana Terorisme. Rangkaian diskusi untuk ketiga isu ini diselenggarakan pada Maret, Juni, dan November 2018. Seluruh rangkaian program yang dijalankan INFID difokuskan pada upaya nyata mencegah penyebaran pesan-pesan radikalisme di tengah masyarakat Indonesia.

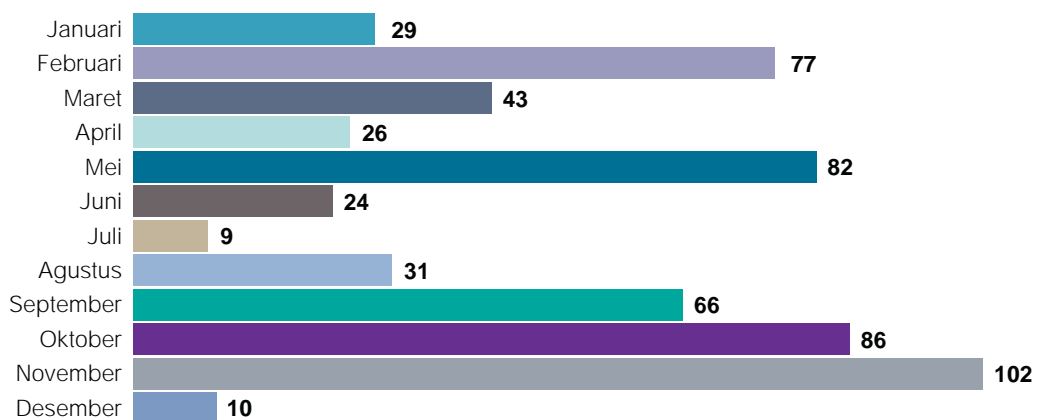


BAB 3 | INFID DALAM MEDIA

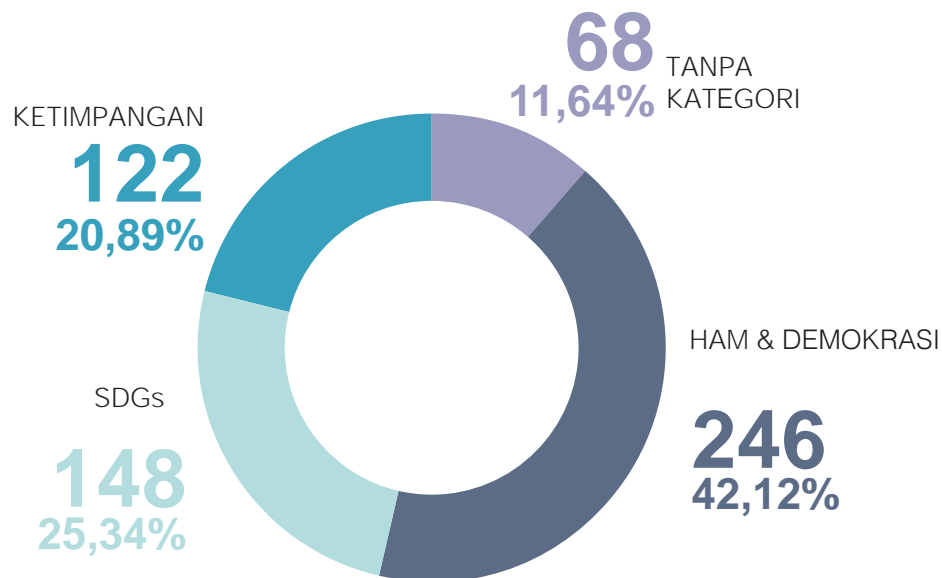
A. Media Massa

Kerja-kerja advokasi INFID untuk isu pembangunan dan demokrasi lebih mudah dipahami publik dengan adanya *media exposure*. *Media exposure* atau terpaan media menjadi salah satu cara tepat agar keberadaan serta peran INFID tetap diketahui secara luas oleh publik serta para pemangku kepentingan. Menilik data liputan media terhadap INFID, pada 2018 terjadi lonjakan jumlah pemberitaan sebesar 41%. Jika pada 2017 jumlah liputan media massa mencapai 243 kali, pada 2018 jumlahnya mencapai 584 kali. Hal ini membuktikan bahwa sajian informasi, program diskusi, maupun pernyataan pengurus INFID memiliki nilai berita (*news value*) sehingga layak mendapatkan ruang pemberitaan di berbagai media massa tanah air. Berdasarkan pendataan, INFID diberitakan oleh 189 media dengan dominasi situs berita media online dan situs *content agregator*. Situs berita merdeka.com, Kompas, dan suaramerdeka.com menjadi tiga media yang paling banyak memberitakan kiprah INFID. *Exposure* tertinggi terjadi November 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Jumlah Liputan 2018



Jumlah Berita Per Isu



Dari sisi isunya, berita seputar HAM mendapatkan porsi paling besar yakni sebanyak 246 berita. Melihat jumlah pemberitaan per isu di atas, pemberitaan seputar isu HAM mencapai 42%.

B. Media Sosial

Penyebaran informasi seputar kerja INFID melalui media sosial merupakan pelengkap dari aktivitas diseminasi informasi melalui website maupun melalui media massa. INFID berharap, sajian informasi melalui berbagai saluran ini kian memudahkan publik yang ingin mendapatkan informasi, berita, serta data seputar isu-isu yang diadvokasi oleh INFID. Pemanfaatan akun media sosial INFID juga menjadi bagian untuk mendapatkan *engagement* dari publik. Hingga akhir 2018 tercatat, jumlah pengikut akun INFID di Facebook mencapai 7.214, untuk Twitter mencapai 3.354 follower, dan follower akun Instagram INFID baru mencapai 1.503.

BAB 4 | ANALISIS DAMPAK PROGRAM





A. Jumlah Beneficiaries

Secara harfiah, *beneficiaries* dimaknai sebagai penerima manfaat. Dalam rentang satu tahun ini, INFID telah menyelenggarakan serta mengikuti 48 jenis kegiatan. Seluruh kegiatan yang diselenggarakan INFID difokuskan pada empat ranah program INFID yang terfokus pada;

1. Program Sustainable Development Goals
2. Program HAM dan Demokrasi
3. Program Penurunan Ketimpangan
4. Program Preventing Violent Extremism

Untuk program Sustainable Development Goals atau SDGs, INFID berkontribusi nyata sebagai mitra pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Kontribusi nyata INFID terlihat dari keterlibatan lembaga ini dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) maupun Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. INFID menyadari, upaya mencapai SDGs membutuhkan peran dari berbagai pihak. Untuk itulah kegiatan dalam bentuk konsolidasi pemangku kepentingan juga dilakukan agar kesadaran mencapai target SDGs ini senantiasa terjaga. Guna mempertajam analisis implementasi pencapaian SDGs, INFID juga menyelenggarakan kegiatan yang secara khusus membahas kerangka fiskal

untuk mendukung capaian SDGs, workshop akuntabilitas pencapaian SDGs, hingga penyusunan instrumen riset untuk mengukur capaian SDGs. Melalui variasi kegiatan itulah, INFID berharap penerima manfaat kegiatan kian memahami esensi pencapaian SDGs. Dari sisi keikutsertaan, maka penerima manfaat untuk kegiatan program SDGs didominasi oleh aparat pemerintah yang menjadi implementator pencapaian SDGs sesuai bidang kerjanya.

Untuk program HAM dan Demokrasi, Program HAM dan Demokrasi INFID bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Fokus kerja program ini meliputi antara lain mendorong implementasi kabupaten/kota HAM, implementasi bisnis dan HAM, pencegahan intoleransi dan ekstremisme, serta menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil, sekaligus melakukan konsolidasi masyarakat sipil dalam merespons perkembangan politik elektoral.

INFID telah aktif melakukan kajian dan penelitian, kemitraan dengan berbagai *stakeholder*, kampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di berbagai kota di Indonesia, dalam melakukan advokasi kebijakan. Salah satu kegiatan unggulan INFID di ranah HAM dan demokrasi ini adalah Festival HAM 2018 yang diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah. Penerima manfaat program ini adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta masyarakat yang hadir dalam festival tersebut. Pada 2018, Wonosobo menjadi Kabupaten Pertama di Indonesia yang memiliki Komisi HAM Kabupaten Wonosobo Ramah HAM (Komisi HAM Daerah) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Wonosobo Kabupaten Ramah HAM. Untuk program Bisnis dan HAM, kemajuan juga terjadi karena pada tahun terakhir RANHAM 2014–2019, pemerintah memasukkan aspek-aspek yang tercantum dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP) sebagai satu bagian dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Dari sisi program Penurunan Ketimpangan jenis kegiatannya berupa workshop, loklatih, konferensi pers, serta diskusi. Untuk workshop, loklatih, dan diskusi penerima manfaatnya adalah para pegiat LSM serta *civil society* yang meminati isu-



isu kemiskinan serta ketenagakerjaan. Untuk konferensi pers dan media *briefing*, penerima manfaatnya adalah wartawan atau media massa. Penyajian informasi melalui media massa dinilai penting agar isu-isu yang disuarakan INFID berpotensi menjadi wacana publik.

Program Preventing Violent Extremism menjadi subprogram sejak 2016 baru di luar tiga program. Penerima manfaat dalam program ini baru publik pada umumnya. Melalui program ini, INFID ingin menyuarakan pentingnya mengenali dan mewaspadaikan gerakan ekstremisme yang mulai menyebar di sejumlah negara di Asia Tenggara.

B. Inovasi Program

Penyelenggaraan diskusi hingga kini masih menjadi metode untuk mempertajam pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap isu-isu yang menjadi bidang kerja INFID. Tindak lanjut dari diskusi ini kemudian diwujudkan ke dalam kegiatan workshop. Di luar itu, pada 2018 lalu INFID juga berinovasi dengan merilis Survei Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga. Hasil survei yang dipublikasikan ini merupakan cara INFID untuk ikut mewarnai khazanah intelektual seputar isu-isu sosial di Indonesia.



Dari sejumlah kegiatan yang diselenggarakan INFID, salah satu inovasi yang terlihat ialah pada penyelenggaraan Festival HAM 2018 di Kabupaten Wonosobo. Ide penyelenggaraan festival ini diapresiasi sangat positif oleh Pemkab Wonosobo. Fahmi Hidayat dari SDGs Centre Wonosobo mengatakan;

Peran terbesar INFID tahun 2018 adalah dalam Festival HAM Indonesia (FHI) 2018 di Wonosobo, di mana INFID memberikan sumbangsih sumberdaya dan pemikiran, sehingga tercetus "Deklarasi Wonosobo" untuk Indonesia yang Toleran, Inklusif dan Berkeadilan". Bersama Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, Gubernur Jawa Tengah, dan Bupati Wonosobo, INFID memainkan peran penting untuk meletakkan HAM dan SDGs pada lingkup yang lebih luas dan level yang lebih tinggi. Human rights city terbukti semakin meluas dan menarik minat berbagai kabupaten atau kota, dan tak meneguhkan peran INFID sebagai salah satu lokomotif utama gerakan ini.

Apresiasi di atas menunjukkan bahwa upaya INFID untuk melibatkan daerah berpeluang besar untuk ditindaklanjuti di masa mendatang. Selain itu, penyebaran pesan seputar HAM dan Demokrasi berpeluang besar untuk dipopulerkan dalam format kegiatan festival.

Tak berhenti di situ, upaya serius INFID untuk menyadarkan pentingnya HAM dalam kehidupan nyata juga dilaksanakan melalui program fellowship remaja usia 18-25 tahun. Peserta fellowship ini diseleksi secara kompetitif dari berbagai daerah di Indonesia untuk belajar tentang isu HAM, toleransi, dan demokrasi. Para peserta juga diajak terlibat dalam promosi dan advokasi kebijakan publik di daerah masing-masing.

Setelah menjalani seleksi secara kompetitif, para remaja ini menjalani mentoring intensif oleh tokoh-tokoh inspiratif bidang HAM, perdamaian, toleransi dan keberagaman, dan kebijakan. Selanjutnya, mereka menyusun proyek mini dan ditutup dengan partisipasi di Festival HAM di Wonosobo. Di Festival HAM tersebut mereka bisa bercerita (sharing) tentang proyek yang sudah dijalankan. Para peserta juga dilibatkan dalam kepanitiaan dan ditutup dengan pelaporan tentang keterlibatan mereka dalam keseluruhan program fellowship dan Festival HAM 2018.



LAMPIRAN I

DAFTAR KEGIATAN PROGRAM SDGs 2018

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	16 Januari 2018	Diskusi Terfokus " Mempersiapkan Tim Koordinasi Nasional SDG's yang Efektif dan Partisipatif
2.	2 Februari 2018	Peer Review Penulisan RAN (Rencana Aksi Nasional) SDGs
3.	8 Februari 2018	Konferensi Pers "Survei Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga"
4.	27 Maret 2018	Dialog Kebijakan SDGs "Menemukan Bentuk Kerjasama antar Pemangku Kepentingan dalam Rangka Memperkuat Kesiapan dan Pelaksanaan SDGs di Indonesia"
5.	2 April 2018	Konferensi Pers "Survey Sanitasi Berbasis Pesantren di Kabupaten Tangerang"
6.	4 April 2018	Rapat Penyusunan Perumusan RAD (Rencana Aksi Daerah) SDGs Kabupaten Maros
7.	25 April 2018	Undangan dalam acara Dialog Kebijakan SDGs "Kerangka Fiskal Yang Diperlukan Untuk Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan SDGs di Kabupaten Kota"
8.	15 Mei 2018	Konsolidasi Persiapan RPJMD 2019-2023, Launching Perda KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
9.	2 Agustus 2018	Workshop Penyusunan ToR: Tata Kelola dan Akuntabilitas Pelaksanaan SDGs di Indonesia
10.	8 Agustus 2018	Menyikapi Angka Kemiskinan di Indonesia dan Pencapaian SDGs
11.	14 Agustus 2018	Peluncuran Program Workshop Sinergi "SDGs 2030 Memperkuat Pelibatan Masyarakat Sipil dan Organisasi Perempuan di dalam Pelaksanaan dan Pencapaian SDGs yang responsif Gender, Inklusif, dan Transformatif".
12.	29 Agustus 2018	Rapat Koordinasi TIM Peneliti Fiskal SDGs
13.	5-6 September 2018	Lokakarya Memperkuat Pelibatan Universitas dalam Pelaksanaan & Pencapaian SDGs

DAFTAR KEGIATAN PROGRAM PROGRAM PENURUNAN KETIMPANGAN

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	23 Januari 2018	Diskusi dan Konferensi Pers "Merespon Forum Ekonomi Dunia 2018: Tentang Penurunan Ketimpangan di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia"
2.	1 Maret 2018	Media Briefing on Inequality and Intolerance
3.	8 Maret 2018	Diskusi dan Konferensi Pers "Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Kesiapan Indonesia"
4.	7 April 2018	Workshop Finalisasi Policy Paper Kerja Layak
5.	8 Mei 2018	Diskusi dan Konferensi Pers "Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Kesiapan Indonesia"
6.	16 Mei 2018	Konsolidasi Penyiapan RPJMD 2019-2023 Hasil Pilkada Serentak 2018: "Memastikan Pembangunan Berkelanjutan Melalui KLHS-RPJMD"
7.	30 Mei 2018	Diskusi dan Buka Puasa Bersama: "Menjawab Tantangan Ketersediaan dan Kebutuhan Kerja Guna Menurunkan Ketimpangan di Indonesia dalam perspektif Pekerja".
8.	31 Juli 2018	Diskusi Kebijakan Ketenagakerjaan "Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Perluasan Kesempatan Kerja"
9.	27 September 2018	Workshop Penguatan Kelompok Kerja Masyarakat Sipil untuk Kerja Layak
10.	19 Oktober 2018	<i>Meeting with NGOs from China, re : Inequality</i>
11.	24 Oktober 2018	Konsultasi LBH Pers dan INFID mengenai Strategi & Kerangka Kerja Masyarakat Sipil dalam kurun waktu 5 tahun ke depan
12.	6 November 2018	Diskusi "Digitalisasi dalam Struktur Perkonomian Indonesia"
13.	12-13 Desember 2018	Loklatih Penguatan Kapasitas Koalisi Masyarakat Sipil: Kesempatan Kerja dan Industri 4.0

DAFTAR KEGIATAN PROGRAM PREVENTING VIOLENT EXTREMISM

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	06-Mar-18	Audensi/Kunjungan Junior Chamber International
2.	09-Mar-18	Diskusi Buku AS. Hikam "Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membangun Radikalisme".
3.	29 Maret 2018	Presentation of Mosque Research INFID
4.	18 Mei 2018	<i>Poetry for Integrity "Gue dan Reformasi"</i>
5.	6 Juni 2018	Diskusi dan Buka Puasa Bersama "Revisi UU Tindak Pidana Terorisme Disahkan: Seperti apa Urgensi dan Kontestasinya?"
6.	5 September 2018	Media Briefing "Bebaskan Meiliana: Negara Wajib Memberikan Keadilan bagi Semua"
7.	30 September 2018	Diskusi Buku "Genosida dan Modernitas (Dalam Bayang bayang Auschwitz)".
8.	24 Oktober 2018	Konsultasi LBH Pers dan INFID Mengenai strategi dan kerangka kerja Masyarakat sipil dalam kurun waktu 5 tahun ke depan
9.	6 November 2018	Pertemuan Koordinasi Riset PVE
10.	30 November 2018	Seminar Nasional "Urgensi dan Strategi Pencegahan Extremisme di Indonesia"

DAFTAR KEGIATAN PROGRAM HAM DAN DEMOKRASI

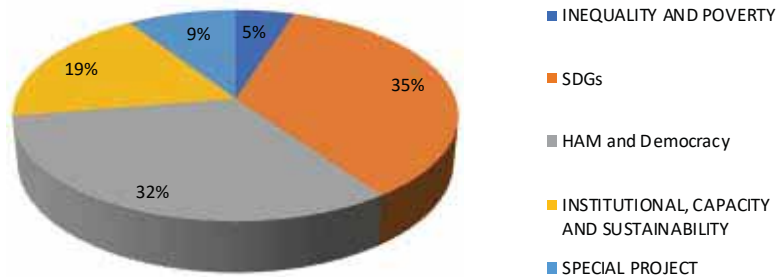
No.	Tanggal	Kegiatan
1.	21 Februari 2018	Bincang-bincang Toleransi dan Perdamaian di Bulan Kasih Sayang: Anak Muda Bertemu Pembuat Kebijakan
2.	2-3 Mei 2018	Loklatih Kabupaten/ Kota HAM (Human Rights Cities) bagi Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Sipil
3.	3 Agustus 2018	Diskusi Publik "Memastikan Praktik Bisnis yang Melindungi dan Menghormati HAM di Indonesia"
4.	9-10 Agustus 2018	Focus Group Discussion; Memastikan Praktik Bisnis yang Melindungi dan Menghormati HAM di Indonesia
5.	18 September 2018	<i>Coordination Meeting for Developing Amicus Curia-Meiliana</i>
6.	20 Oktober 2018	World Human Rights Cities Forum 2018 "Human Rights Cities and SDGs in Indonesia: Good Practices and Challenges" di KIM Daejung Center, Gwangju
7.	13-15 November 2018	Festival HAM 2018, Merawat Keragaman, Memperkuat Solidaritas: Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan
8.	19 Desember 2018	<i>NGOs Dialogue on Fostering Democracy on Malaysia, Indonesia and Beyonds</i>



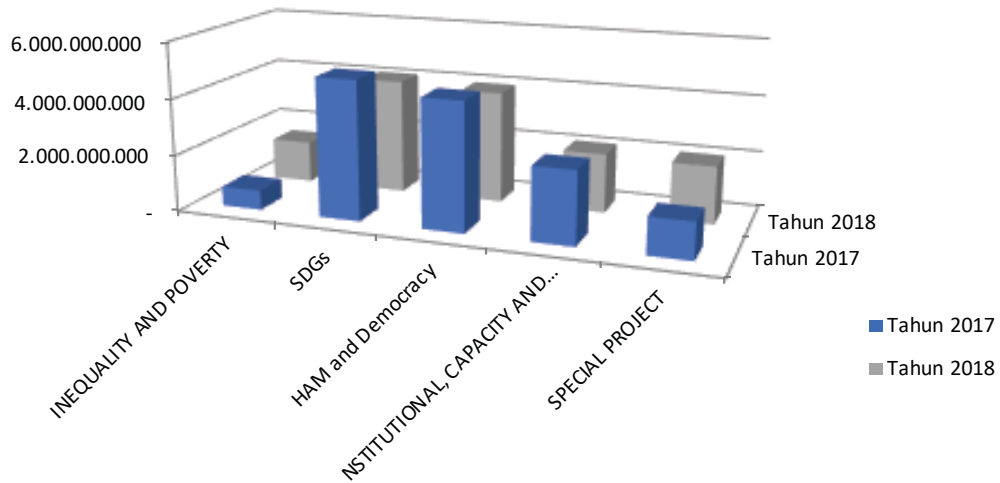
LAMPIRAN II

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN DAN HASIL AUDIT

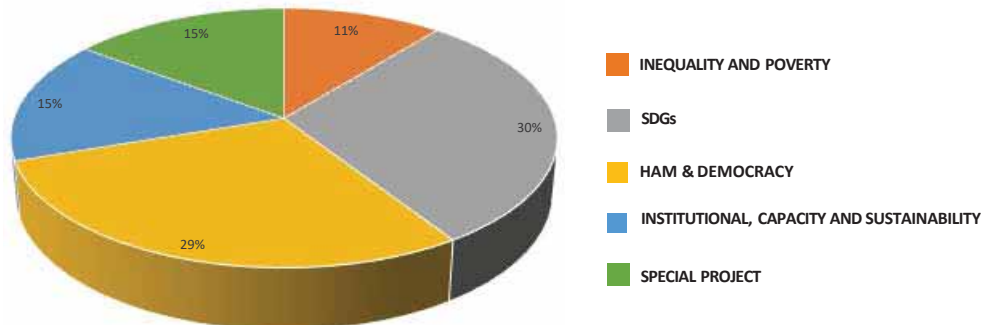
Biaya per Program tahun 2017



Comparison program expenditures 2017 & 2018



Program Expenses 2018





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Laporan No. 00053/0946/AU.1/11/1052-1/1/IV/2019

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
Report No. 00053/0946/AU.1/11/1052-1/1/IV/2019

Kepada Yth.
Direksi
International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)

To
Board of Directors
International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)

Laporan audit atas laporan keuangan

Kami telah mengaudit laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Auditing report for financial statements

We have audited the financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2018 and the income statement, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with statement of Financial Accounting Standard(s) that applied in Indonesia and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00053/0946/AU.1/11/1052-1/1/IV/2019

Opini

Menurut opini kami International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyajikan secara wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Auditor Independen lain dengan nomor Laporan PHHARP/773/MA/Ary/2018 tanggal 30 April 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 00053/0946/AU.1/11/1052-1/1/IV/2019

Opinion

In our opinion the accompanying financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) present fairly without exceptional in all material respects, the financial position of Desember 31, 2018 and their financial performance and cash flows for the year ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Things

The Financial Statements for the year ended 31 December 2017 have been audited by another Independent Auditor with Report number PHHARP/773/MA/Ary/2018, April 30 2018, with reasonable opinions in all material matters.

KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan Jakarta
Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Nomor 946/KM.1/2015

M. Kuncara Budi Santosa, SE, Ak, MM, CA, CPA, BKP

Register Akuntan Publik Nomor AP.1052
Register IAPI Nomor 2198

Jakarta, 27 Mei 2019 / May 27, 2019

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Laporan posisi keuangan**
Pada tanggal 31 Desember 2018

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID) Statements
of financial position**
As of 31 December 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	2c, 3	5.674.737.592	3.289.706.867	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain	4	72.598.826	13.300.000	Other receivables
Uang muka program	5	386.055.700	321.407.540	Advance program
Jumlah aset lancar		6.133.392.118	3.624.414.407	Total current assets
Aset tidak lancar				Non current assets
Aset tetap				Fixed assets
Biaya perolehan	2d, 6	935.230.084	912.803.218	Acquisition cost
Akumulasi depresiasi		(935.230.084)	(528.386.530)	Accumulated depreciation
Jumlah aset tidak lancar		-	384.416.688	Total non current assets
Jumlah aset		6.133.392.118	4.008.831.095	Total assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Laporan posisi keuangan
Pada tanggal 31 Desember 2018

(Disajikan dalam Rupiah)

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Statements of financial position
As of 31 December 2018

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ <i>Notes</i>	2018	2017	
Liabilitas dan aset bersih				<i>Liabilities and net assets</i>
Liabilitas				<i>Liabilities</i>
Utang Program	7	526.888.175	1.092.744.537	<i>Account Payable Program</i>
Utang Non Program	7	-	22.716.093	<i>Account Payable Non Program</i>
Utang Pajak		79.710.746	38.239.762	<i>Tax Payable</i>
Jumlah liabilitas		606.598.921	1.751.780.032	<i>Total liabilities</i>
Aset bersih				<i>Net assets</i>
Terikat		3.232.953.957	712.138.813	<i>Restricted</i>
Tidak Terikat		2.293.839.240	1.544.912.250	<i>Unrestricted</i>
Jumlah aset bersih		5.526.793.197	2.257.051.063	<i>Total net assets</i>
Jumlah liabilitas dan aset bersih		6.133.392.118	4.008.831.095	<i>Total liabilities and net assets</i>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements



LAMPIRAN III

KISAH BAIK ADVOKASI SDG INFID 2015-2017 MEWUJUDKAN SDG MELALUI AKSES SANITASI DAN AIR BERSIH PONDOK-PONDOK PESANTREN DI KAB TANGERANG. BANTEN. INDONESIA

Disiapkan Oleh Tim INFID :

Bona Tua, Denisa Kawuryan, Sugeng Bahagijo dan Khoirun Huda.

Ringkasan

Dengan penguatan kapasitas dan pendampingan berlanjut oleh INFID selama dua tahun lebih, 2015-2017, CSO berhasil meyakinkan pemda untuk melaksanakan dan mewujudkan SDG. Melalui produksi bukti bukti dan data-data empiris hasil riset dan advokasi kebijakan oleh CSO, Bappeda dan Kepala daerah akhirnya memprioritaskan kelompok warga yang selama ini kurang terlayani dan kurang mendapat perhatian, yaitu program sanitasi dan air bersih di Pondok Pesantren di Kab Tangerang. Sanitasi dan air bersih adalah Tujuan SDG no.6.

1.KEADAAN SEBELUM

"Wcnya ada dua, siswa sudah terbiasa barengan dan berjamaah, tidak hanya salat saja yang berjamaah"

-Hj Neng Mamnu'a, Ustazah Pesantren Salafi Putri di Kabupaten Tangerang.

Kutipan diatas memperlihatkan situasi nyata sanitasi dan air bersih di berbagai Pondok Pesantren Putri di Kab Tangerang. Pesantren salafi tempat dimana Hj. Neng Mamnu'a mengajar adalah salah satu dari ratusan pesantren di Kabupaten Tangerang yang memiliki kondisi sanitasi sangat buruk dengan MCK tradisional seperti empang dan bambu.

Kab Tangerang terletak tidak jauh dari Ibukota Jakarta. Dikenal sebagai daerah industri dengan ribuan pabrik-pabrik dengan tujuan ekspor seperti industri sepatu, elektronik, pakaian jadi dan sebagainya. Namun demikian, Kab tengerang juga masih merupakan daerah pertanian dengan wilayah pedesaan dan lahan pertanian yang luas. Data sementara tahun 2017 terdapat lebih dari 1000 pondok pesantren besar dan kecil. Yang menengah besar memiliki santri (putra dan putri) antara 50-100 orang dan yang kecil menengah antara 10 sampai 50 orang.

Hal ini patut menjadi perhatian karena permasalahan sanitasi tidak hanya permasalahan kesehatan namun juga ekonomi nasional dan kualitas hidup dalam arti luas. Berdasarkan penelitian World Bank, sanitasi yang buruk menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sebesar 56 triliun rupiah atau 2,3% dari *Gross Domestic Product* (World Bank, 2006).

Mimpi dan kepentingan yang sama juga dimiliki pondok-pondok pesantren yang jumlahnya terus meningkat di Indonesia, hingga mencapai 28.194 pesantren pada tahun 2016 dengan 4.290.626 santri yang kualitas hidupnya patut untuk diperhatikan.



Foto kondisi pesantren di Kab. Tangerang oleh Helmi Shemi/IDN Times¹

¹ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/helmi/5-fakta-mencengangkan-buruknya-sanitasi-ratusan-pesantren-di-tangerang/full>

2. INTERVENSI INFID

Beranjak dari kekhawatiran tersebut, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kab. Tangerang (GP) sebagai salah satu mitra kerja International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) mengambil inisiatif untuk melaksanakan dan mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan ke-6 dengan fokus sanitasi air bersih di pondok-pondok pesantren di Kab Tangerang.

INFID sejak 2015 telah didukung oleh Ford Foundation mendorong pelaksanaan dan perwujudan SDGs di Indonesia, termasuk dengan memperkuat partisipasi dan kapasitas CSO di berbagai nasional dan di berbagai Kabupaten dan Kota di Indonesia. Salah satu yang didamping adalah CSO dan Pemda di Kab Tangerang. CSO yang menjadi mitra infid adalah GP Ansor.

Dipilihnya GP Ansor Kab Tangerang antara lain mereka memiliki program kerja dan kegiatan yang menarik antara lain (a) kegiatan-kegiatan dialog lintas iman dan pemajuan toleransi; (b) pendidikan demokrasi melalui sekolah demokrasi; (c) penguatan dan advokasi hak hak pekerja termasuk pelatihan vokasi dan (d) pelaksanaan SDG

Selama 2 tahun lebih, sejak 2015-2017, INFID telah melaksanakan beberapa kegiatan untuk sosialisasi dan pelaksanaan SDGs di Kab Tangerang, diantaranya: a) Melakukan pertemuan-pertemuan baik formal dan informal kepada Pemda/Bappeda untuk membangun komitmen, b) Pendampingan dan pengembangan kapasitas kepada multipihak di Kab.Tangerang mengenai tema SDGs, sejak 2014/2015, melalui berbagai kegiatan antara lain lokakarya dan dialog multipihak, c) Membantu dukungan dana untuk penelitian keadaan nyata sanitasi pesantren di 829 Pondok Pesantren di Kab.Tangerang.

Pada awalnya, GP Ansor memiliki dua program prioritas utk pelaksanaan SDG di Kab Tengerang, yaitu (i) Perluasan Pelatihan Vokasi dengan mendorong pemda mengalokasikan dana untuk balai latihan kerja (BLK) dan pelatihan kerja untuk Industri dan (ii) Perbaikan sanitasi dan air bersih di berbagai pondok pesantren. Akhirnya, agenda sanitasi dan air bersih diputuskan menjadi ujicoba dengan pertimbangan; (a) lebih mudah utk meyakinkan Bappeda dan Kepala Daerah; (b) Manfaatnya langsung

diterima oleh warga;(c) mengurangi ketimpangan pelayanan publik khususnya dalam akses air bersih dan sanitasi.

Sebagai langkah dan strategi, GP Ansor didukung oleh INFID, Bappeda Kab. Tangerang dan *Integrated Water Sanitation and Hygiene Programme (iWash)* memutuskan untuk membuat bukti bukti untuk mendukung agenda sanitasi menjadi agenda penting kepala daerah/Bupati. Caranya dengan melakukan survei keadaan sanitasi dan air bersih di pondok pesantren. Survei kemudian dilakukan kepada 829 pondok pesantren dari jumlah total sekitar 1000 pondok pesantren di Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu 3 bulan (survei lapangan dilaksanakan pada Oktober-Desember 2017).

Survei dilakukan dengan metode kualitatif yaitu wawancara dan kunjungan lapangan melibatkan 21 tim surveyor lapangan, 3 orang tim supervisor dari GP Ansor dan 4 orang tim monitoring dari Bappeda Kabupaten Tangerang. Terdapat juga aplikasi online yang digunakan surveyor yaitu mWater Portal melalui perangkat komunikasi android, dengan fasilitas *Global Positioning System (GPS)* untuk akurasi titik lokasi pesantren yang telah di survey, disertai fasilitas unggah/*upload* foto pesantren untuk memberikan gambaran kondisi faktual pesantren. Kedua fasilitas tersebut bertujuan sebagai mekanisme akuntabilitas survei.

Temuan dari survey 829 pesantren tersebut diantaranya: **Pertama**, sebagian besar pesantren belum tersentuh oleh program pemerintah baik pusat maupun kabupaten. Hal ini dikarenakan 1) Keterbatasan akses dan pengetahuan pesantren terhadap kebijakan dan program pemda. Seperti dari sisi administrasi ditemukan banyak pesantren yang secara administrasi nyaris tidak memiliki apa-apa, bahkan sekedar nama pesantren.

Pada fakta lapangan, dari 829 Pesantren yang terdata hanya ada 157 Pondok Pesantren yang telah memiliki Badan Hukum, selebihnya 672 pesantren sampai saat ini belum memiliki badan hukum; 2) Penafsiran Undang-undang No.23 Tahun 2014 yang menganggap persoalan pesantren adalah persoalan agama, dan persoalan agama menjadi kewenangan pemerintah pusat. Hal inilah yang lantas “membelenggu” pemda untuk membuat program terhadap pesantren.

Kedua, sebagian besar kondisi pesantren masih memprihatinkan, antara lain masih banyak yang menggunakan jamban dengan ketersediaan yang kurang memadai serta sekitar 35% pesantren belum memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK) yang layak.

Ketiga, sekitar 7% dari jumlah pesantren yang dikunjungi belum memiliki kobong. Separuh dari pesantren yang memiliki asrama juga memiliki kondisi yang tidak layak, yaitu semi permanen, kurangnya ventilasi dan pencahayaan jendela serta standar bangunan yang kurang layak (dari bambu).

Keempat, minimnya dana dari pesantren, khususnya terkait dengan kesejahteraan guru dan pengasuhnya. Stigma masyarakat terkait dengan lingkungan pesantren yang kurang sehat dan bersih mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk mengirimkan anaknya belajar di pesantren.

3. HASIL KERJA

Hasil temuan survei selanjutnya dipresentasikan kepada Bappeda, sejumlah fraksi DPR, DPRD dan Bupati. Pertemuan tersebut melahirkan program SANITREN (Sanitasi Berbasis Pesantren) yang bertujuan untuk membangun fasilitas sanitasi berupa kamar mandi, toilet, tempat mencuci santri dan lainnya di seluruh pondok pesantren yang ada di Kab. Tangerang dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun.

Kabupaten Tangerang juga telah berhasil menyepakati peraturan daerah mengenai pemberdayaan pesantren di bulan desember 2016, sebagai bentuk kesepakatan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tangerang untuk mendukung pondok pesantren. Isi dari peraturan daerah tersebut yaitu dukungan pemda kepada pesantren melalui dukungan dana Bantuan Operasional Santri.



Foto peletakan batu pertama program Sanitren, di Pesantren Miftahul Huda Husmaniyah No 13, Desa Kayu Agung, oleh Camat Sepatan, Kab.Tangerang².

Upaya kolaborasi multipihak antara INFID, GP Ansor dan Bappeda Kab. Tangerang dengan program SANITREN telah memberikan dampak kepada ribuan santri dan seluruh pihak di kawasan pesantren untuk mendapatkan sanitasi yang lebih baik. Berdasarkan data dan informasi, alokasi dana serta penerima manfaat program SANITREN mengalami perkembangan yang signifikan.

Pada 2018 sudah dibangun 64 pesantren dengan dana pemda melalui manajemen swakelola. Pada tahun 2019 dilanjutkan dengan pembangunan sanitasi pesantren yang hingga saat ini telah sampai angka di 150 unit. Anggaran bertambah untuk 1 unit pesantren yaitu dari sekitar 100 juta di tahun 2018, menjadi 128 juta per pesantren di tahun 2019 (total kurang lebih 6 miliar di 2018, kemudian berkembang total menjadi kurang lebih 20 miliar di tahun 2019). Program SANITREN menjadi **program unggulan** Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2019-2023³.

² <https://tangerangonline.id/2019/10/31/sanitren-peletakan-batu-pertama-di-ponpes-miftahul-huda-husmaniyah-sepatan/>

³ <https://wartakota.tribunnews.com/2019/02/13/sebanyak-46-sanitasi-berbasis-pesantren-dibangun-di-tangerang>

4. DAMPAK

“Although we take it for granted, sanitation is a physical measure that has probably done more to increase human life span than any kind of drug or surgery.”

-Deepak Chopra-

Selama 2 tahun dilaksanakan, yaitu 2018 dan 2019, lebih dari 100 pondok pesantren termasuk pondok putri telah diperbaiki. Lebih dari 5000 warga telah merasakan ketersediaan, kebersihan dan kenyamanan sanitasi dan air bersih di lembaga pendidikan ini. Utk selanjutnya program Sanitren akan terus berjalan dilanjutkan hingga 2020-2024.

Dampak lain program SANITREN juga membantu program pemerintah pusat “Gerakan 100-0-100” di tingkat nasional, khususnya terhadap upaya pemenuhan target kebijakan Pemerintah Indonesia 100% akses penduduk terhadap sanitasi layak dan air bersih di seluruh Indonesia hingga tahun 2030.

Berkat program SANITREN, pemerintah Kab Tangsel untuk ketiga kalinya dianugerahi penghargaan “SindoWeekly Government Award” Kategori Kesehatan yang diberikan secara langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, kepada Bupati Zaki di Hotel Borobudur Jakarta pada 30 April 2019⁴.

Harapannya, kolaborasi multipihak layaknya program SANITREN dapat memberikan inspirasi bagi scaling up di level nasional dalam bentuk kolaborasi-kolaborasi multipihak di 500 kab dan kota di seluruh Indonesia, khususnya yang kab dan kota yang masih defisit air bersih dan sanitasi agar “No One Left behind” dan kualitas hidup rata rata warga Indonesia di tahun 2030.

⁴ <https://nonstopnews.id/post/program-sanitasi-pesantren-kab-tangerang-raih-penghargaan-kategori-kesehatan>



Foto Sanitren yang telah selesai dibangun⁵

INFID berharap, selain program sanitasi dan air bersih, INFID terus dapat membantu CSO dan pemda dalam pelaksanaan SDG dengan agenda berikutnya yang dipandang prioritas oleh Pemda dan CSO, yaitu pelatihan vokasi dan pelatihan kerja. Karena ini merupakan agenda prioritas SDG.

5 <https://tangerang7.com/wujudkan-generasi-religius-pemkab-tangerang-bangun-sanitren/>



REFERENSI

1. Video Testimonial Perjalanan SDGs di Tangerang
<https://www.youtube.com/watch?v=6KJBSiIT76k&t=47s>
2. Air Bersih Tak Layak, GP Ansor Minta Pemerintah Perhatikan Sanitasi Pesantren
<http://www.kontakbanten.co.id/2018/04/air-bersih-tak-layak-gp-ansor-minta.html>
3. Sanitasi 829 Pesantren di Kabupaten Tangerang Tidak Layak
<https://www.wartaekonomi.co.id/read178540/sanitasi-829-pesantren-di-kabupaten-tangerang-tidak-layak.html>
4. Pemkab Tangerang Luncurkan Program Sanitasi Pondok Pesantren
<http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/22024/Pemkab-Tangerang-Luncurkan-Program-Sanitasi-Pondok-Pesantren>
5. 150 Ponpes di Tangkab Terima Sanitren 2019
<https://tangerangonline.id/2019/10/23/150-ponpes-di-tangkab-terima-sanitren-2019/>
6. Program sanitasi Kab.Tangerang jadi contoh nasional
<https://tangerangonline.id/2019/09/24/program-sanitasi-tangkab-jadi-contoh-nasional/>



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:



infid



infid_ID



infid_ID